

MEMBANGUN KARAKTER ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH TINGGI

Mimin Ninawati¹, Arifatul Adawiyah², Ike Nuryolanda³, Maura Febriyanti
Zulkarnain⁴, Siti Afifah Fadhilah⁵, Siti Nur Aida⁶

^{1,2,3,4,5,6}PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.Hamka

¹miminninawati30@gmail.com, ²arifatuladawiyah3@gmail.com, ³yolandaike846@gmail.com, ⁴febriyantimaura0@gmail.com, ⁵afifahhh2108@gmail.com,
⁶sitinuraida489@gmail.com

ABSTRACT

Civic Education is a strategic tool that can be used to build a moral national character and stop corruption in Indonesia. The purpose of this study is to see how cognitive learning (Civics Education) contributes to the formation of young people who have critical understanding, responsibility, and democratic attitudes in facing social challenges, including the threat of corruption. The moral condition of the younger generation is very important to pay attention to, especially because corruption endangers the government and the survival of the nation. The method used in this research is to analyze relevant literature, including books and journals that discuss the role of Civics in character building and efforts to eradicate corruption. The research shows that Civics can instill anti-corruption values such as honesty, responsibility, and courage through moral and cultural education methods. As part of the mental revolution, these values shape the character of the younger generation. In addition, incorporating anti-corruption values into the formal school curriculum can be a big step towards establishing a culture of integrity in society. This study shows that strengthening Civics Education is essential to make people understand their rights and obligations as citizens and commit to building a clean and transparent government.

Keywords : *anti corruption, education citizenship, national character*

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan adalah alat strategis yang dapat digunakan untuk membangun karakter bangsa yang bermoral dan menghentikan korupsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pembelajaran kognitif (PKn) berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang memiliki pemahaman kritis, tanggung jawab, dan sikap demokratis dalam menghadapi tantangan sosial, termasuk ancaman korupsi. Kondisi moral generasi muda sangat penting untuk diperhatikan, terutama karena korupsi membahayakan pemerintahan dan kelangsungan hidup bangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis literatur yang relevan, termasuk buku dan jurnal yang

membahas peran PKn dalam pembentukan karakter dan upaya pemberantasan korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa PKn dapat menanamkan nilai-nilai anti-korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian melalui metode pendidikan moral dan budaya. Sebagai bagian dari revolusi mental, nilai-nilai ini membentuk karakter generasi muda. Selain itu, memasukkan nilai anti-korupsi ke dalam kurikulum sekolah formal dapat menjadi langkah besar menuju pembentukan budaya integritas di masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa penguatan PKn sangat penting untuk membuat orang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Keywords: anti korupsi, karakter bangsa, pendidikan kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu masalah global yang menjadi penghalang utama bagi kemajuan negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, Korupsi juga mengancam stabilitas sosial, pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Dalam dekade terakhir ini Indonesia dan beberapa negara lain telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan menggunakan berbagai strategi dan kebijakan. Korupsi tetap menjadi masalah sistemik yang sulit diberantas hingga saat ini. Korupsi sering terjadi di Indonesia dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Untuk menangani masalah ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah didirikan sebagai lembaga independen dengan fungsi

untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah pihak tertentu yang menentangnya dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas. Kurang moralitas, integritas, dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan adalah salah satu masalah utama yang menyebabkan banyak korupsi, terutama di kalangan generasi muda. Pendidikan menjadi salah satu cara penting untuk membangun budaya anti-korupsi. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari kurikulum sekolah untuk menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian. Pendidikan

Kewarganegaraan dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen generasi muda terhadap budaya anti-korupsi dengan pendekatan yang holistik. Pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar untuk memperkuat karakter siswa sebagai calon pemimpin bangsa di perguruan tinggi. Selain berfungsi sebagai pendidikan karakter, PKN juga berfungsi sebagai pendidikan politik, moral, demokrasi, dan hukum. Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui pembelajaran yang relevan dan interaktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari berbagai cara pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat membantu generasi muda menjadi perubahan dan memerangi korupsi. Diharapkan PKN dapat membantu membangun budaya integritas di Indonesia dengan memfokuskan pada penggabungan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan masalah yang dihadapi dalam menerapkan

pendidikan anti-korupsi dan menemukan solusi yang kreatif dan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat umum memerangi korupsi dengan menyediakan data dan fakta yang relevan. Dalam jangka panjang, diharapkan bahwa pendidikan anti-korupsi akan menghasilkan generasi muda yang berbudi luhur yang dapat berperan penting dalam pembangunan negara yang bebas dari korupsi.

B. Metode Penelitian

Artikel ini disusun menggunakan metode studi pustaka *library research*, yang mengacu pada sumber-sumber yang relevan seperti jurnal dan buku yang membahas tentang PKN sebagai pembentuk karakter bangsa dan mencegah korupsi. Studi pustaka, yang juga dikenal sebagai studi teks, melibatkan beberapa pendekatan. Pertama kajian teoretis terhadap suatu disiplin ilmu yang kemudian dapat dilanjutkan dengan penelitian empiris untuk memperoleh kebenaran secara langsung. Kedua, studi yang bertujuan untuk menganalisis objek penelitian secara filosofis atau teoritis serta mengevaluasi validitasnya.

Ketiga, penelitian yang berfokus pada kajian teoretis dalam linguistik. Keempat, adalah kajian terhadap karya sastra. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai PKN dan pembentukan karakter bangsa dan mencegah korupsi

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dan anti Korupsi

PKn berasal dari istilah *Civic Education*, dari beberapa ahli diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah Pendidikan Kewargaan dipopulerkan oleh Azyumardi Azra dan Tim *ICCE (Indonesian Center for Civic Education)*, sementara istilah Pendidikan Kewarganegaraan digunakan oleh Zamroni, Muhammad Numan Soemantri, Udin S. Winataputra, dan Tim *CICED (Center for Indonesian Civic Education)* (Winataputra, 2012) Branson (1999). Menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi fokus utama. Menurutnya,

tidak ada tugas yang lebih penting daripada membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang diperlukan, serta komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai prinsip dasar dan demokrasi. Tujuan dari PKn adalah untuk mendorong partisipasi aktif, rasional, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik oleh warga negara yang menghormati nilai-nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab membutuhkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual, serta kemampuan untuk berpartisipasi. Selain itu, partisipasi tersebut juga perlu ditingkatkan melalui pengembangan disposisi atau karakter tertentu yang dapat memperkuat kemampuan individu dalam berkontribusi pada proses politik dan mendukung kelangsungan sistem politik yang sehat, serta perbaikan sosial yang berkelanjutan.

b. Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Karakter

Karakter merujuk pada watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian individu yang terbentuk melalui internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan dijadikan

sebagai dasar dalam cara pandang, pola pikir, sikap, dan tindakan (Mahanani et al. 2023). Kebajikan ini mencakup berbagai nilai, moral, dan norma, seperti kejujuran, keberanian, kepercayaan, serta penghormatan terhadap orang lain. Hubungan dan interaksi antara individu dengan sesama turut berperan dalam membentuk karakter masyarakat dan bangsa (Rahmatiani 2020).

Secara umum, relevansi karakter dapat dipahami sebagai pola pikir dan perilaku yang menjadi ciri khas setiap individu dalam berinteraksi, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara (Apriliani et al. 2021). Nilai-nilai karakter adalah elemen penting yang harus ada pada setiap individu dan diterapkan dalam berbagai aktivitas hidup mereka. Penguatan revolusi karakter bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang menanamkan nilai-nilai budi pekerti, mendukung pembangunan karakter generasi muda sebagai bagian dari revolusi mental, serta menjadi bagian dari orientasi program penguatan pendidikan karakter yang sejalan dengan paradigma pembangunan nasional (Zulfikar and Dewi 2021).

c. Kebijakan hukum Anti Korupsi

Salah satu masalah utama yang menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah korupsi. Kebijakan hukum anti-korupsi memiliki peran strategis dalam mencegah, menindak, dan memberantas korupsi dalam situasi ini. Salah satu definisi korupsi adalah penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah untuk meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum dan menutup celah hukum sebelumnya.

Korupsi telah berkembang menjadi masalah sistemik yang membahayakan keuangan negara dan melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat. korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa yang membutuhkan tindakan pemberantasan, termasuk penerapan sistem pembuktian terbalik. Beberapa perubahan besar yang dibuat oleh

undang-undang ini termasuk pengembangan alat bukti yang sah, termasuk dokumen elektronik seperti email dan rekaman digital; penetapan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dan pemberatan hukuman dan denda, terutama untuk korupsi yang berkaitan dengan dana publik seperti penanggulangan bencana dan keamanan nasional, tindak pidana korupsi di Indonesia mencakup berbagai bentuk, suap, gratifikasi, penggelapan, dan pemerasan.

Di Indonesia, kebijakan anti-korupsi didasarkan pada tiga pilar utama: pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset. Untuk mencegah korupsi, orang dididik dan disosialisasikan tentang bahayanya. Mereka menerapkan transparansi dan akuntabilitas, seperti dengan menggunakan teknologi informasi dalam manajemen anggaran dan pelayanan publik. Pilar kedua adalah tindakan, yang melibatkan penguatan institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Untuk memberikan efek jera, juga penting untuk menerapkan sanksi hukum yang tegas, seperti penjara, denda, dan penyitaan aset yang dihasilkan dari korupsi. Meskipun demikian,

pemulihan aset membutuhkan kerja sama internasional untuk menemukan, membekukan, dan mengembalikan aset yang dihasilkan dari korupsi di luar negeri. Namun, ada banyak kesulitan dalam menerapkan kebijakan hukum anti-korupsi. Budaya korupsi adalah salah satunya, yang telah berakar kuat di berbagai bagian masyarakat, sehingga sulit untuk dihapus tanpa mengubah nilai-nilai sosial. Selain itu, intervensi politik sering menyebabkan lembaga penegak hukum menjadi kurang independen, sementara kekurangan sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan dalam menangani kasus korupsi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan strategis seperti meningkatkan kekuatan dan autonomi lembaga anti-korupsi, melakukan reformasi birokrasi untuk membuat sistem yang lebih efektif dan transparan, dan meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Untuk menangani korupsi lintas batas dengan lebih baik, kolaborasi internasional juga perlu diperkuat. Oleh karena itu, kebijakan hukum anti-korupsi merupakan langkah menuju pemerintahan yang

berintegritas, bersih, dan transparan. Semua orang, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan komunitas internasional, harus membantunya untuk berhasil. Ketika semua orang berkomitmen, korupsi dapat dihilangkan, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimalkan (Siagian et al. 2024).

d. Kontribusi Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Anti Korupsi di Sekolah Tinggi

Lembaga pendidikan memegang peran sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, karena melalui pendidikan, sikap anti-korupsi dapat ditanamkan. Pendidikan dan kebudayaan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini memiliki hubungan yang erat, di mana pendidikan dan kebudayaan saling mempengaruhi. Pendidikan anti-korupsi merupakan upaya menanamkan pemahaman serta mencegah praktik korupsi dalam keluarga dan masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal (Safitri, Dewi, and Furnamasari 2021). Pendidikan ini tidak sekadar memperkenalkan nilai anti-korupsi, tetapi juga bertujuan untuk membuat individu memahami, menghayati, dan

mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama pendidikan anti-korupsi adalah untuk mengubah sikap terhadap korupsi, memperluas pemahaman mengenai korupsi, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melawan korupsi (Pratiwi 2024).

Nilai anti korupsi dapat diterapkan melalui pendidikan yang mengedepankan budaya anti-korupsi. Proses pembelajaran yang fokus pada pembentukan sikap mental dan nilai moral anti korupsi sangat penting di lingkungan pendidikan (Nestariana 2023). Hal ini bertujuan untuk membentuk pandangan dan sikap tegas terhadap segala bentuk praktik korupsi, sehingga para pelajar tidak mentolerir tindakan tersebut. Selain itu, pendidikan harus diarahkan untuk membentuk karakter yang baik dan menanamkan pemahaman etika kuat. Dengan demikian, pengembangan budaya anti-korupsi di kalangan dunia pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang manfaatnya dirasakan secara luas, baik di sektor pendidikan maupun masyarakat. Ada sembilan nilai untuk Komisi Pemberantasan Korupsi di pendidikan :

1. Nilai Kejujuran

Kejujuran membawa seseorang untuk melakukan hal kebaikan dan kebenaran baik perkataan maupun perbuatan, kejujuran sudah harus diajarkan sejak usia dini. Kejujuran kunci utama dalam kesuksesan (Suhandi, Dewi, and Furnamasari 2022).

2. Nilai Keadilan

Keadilan itu bersifat adil, dari perlakuan terhadap sesuatu yang tidak boleh pilih kasih.

3. Nilai Keberanian

Keberanian adalah sikap yang tidak takut menghadapi berbagai tantangan. Keberanian tercermin dalam tindakan yang jujur, berani menolak ajakan untuk melakukan hal-hal buruk, serta memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan.

4. Sederhana

Sederhana ialah perilaku keseharian yang tidak menunjukkan sikap berlebihan.

5. Tanggung Jawab

Rasa tanggung jawab tercermin dalam upaya untuk menepati janji yang telah dibuat. Seseorang harus menunjukkan komitmen terhadap tindakan dan perkataannya, serta

bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil.

6. Disiplin

Disiplin merupakan sikap yang taat pada peraturan, yang dapat meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri.

7. Kerja Keras

Kerja keras adalah upaya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang memuaskan melalui pendekatan yang serius, sambil menghindari tindakan yang dapat mengarah pada kecurangan. Kerja keras dilakukan dengan penuh kesungguhan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan optimal.

8. Peduli

Kepedulian terhadap sesama mencakup rasa empati dan perhatian terhadap orang lain serta lingkungan di sekitar kita.

9. Mandiri

Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Keberanian dapat dibangun melalui sikap jujur, seperti menolak ajakan untuk melakukan kesalahan, melaporkan tindakan yang tidak benar, serta berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan

(Sunaryati et al. 2023). Nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama dan tercermin dalam falsafah Pancasila (Febriyana et al. 2022). Namun, nilai-nilai tersebut mulai menurun akibat budaya konsumerisme yang dipicu oleh modernisasi dan mobilitas yang semakin meningkat seiring dengan globalisasi. Globalisasi terjadi berkat arus informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Akibatnya, individu di seluruh dunia cenderung mengadopsi gaya hidup dan budaya yang serupa. Sikap hedonisme juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi. Peningkatan perilaku koruptif yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

D. Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting untuk membangun karakter generasi muda yang jujur dan berkomitmen pada budaya anti-korupsi. PKn dapat membantu menanamkan budaya integritas sejak dini dengan memasukkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan disiplin ke dalam

proses pembelajaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik dalam pendidikan anti-korupsi, yang dapat diterapkan melalui pembelajaran interaktif dan kurikulum formal, dapat meningkatkan pemahaman kritis siswa terhadap bahaya korupsi. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjadi agen perubahan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan jika mereka menyadari pentingnya prinsip-prinsip moral dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kebijakan anti-korupsi yang mencakup pendidikan budaya dan moral juga harus diperkuat dengan dukungan dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Budaya anti-korupsi dapat ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara jika pendidikan, kebijakan hukum, dan kesadaran kolektif bekerja sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pendidikan kewarganegaraan di tingkat pendidikan tinggi adalah langkah strategis yang penting untuk menghasilkan generasi muda yang tidak hanya menghargai nilai-nilai kebangsaan tetapi juga berkomitmen untuk melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, Medhitya Alda, Arifin Maksum, Prayuningtyas Angger Wardhani, Selvia Yuniar, and Setyowati Setyowati. 2021. "Pengembangan Media Pembelajaran PPKn SD Berbasis Powtoon Untuk Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8(2):129. doi: 10.30659/pendas.8.2.129-145.
- Febriyana, Diah, Nagita Octaviani, Thania Anggraeni, and Riska Andi Fitriano. 2022. "Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi Yang Terjadi Di Indonesia." *Gema Keadilan* 9(3). doi: 10.14710/gk.2022.16421.
- Mahanani, Dila, Mohammad Mustari, Edy Kurniawansyah, and Bagdawansyah Alqadri. 2023. "Peran Kepala Sekolah Dan Guru Ppkn Dalam Implementasi Karakter Disiplin Siswa Di Smpn 1 Kuripan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8(2):3.
- Nestariana, Ria. 2023. "Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar." *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran* 01(01):28–31.
- Pratiwi, Adelia Yunita. 2024. "PERAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI." *Cendekia Pendidikan* 4(4):50–54.
- Rahmatiani, Lusiana. 2020. "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa." *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan* 87–94.
- Safitri, Alvira Oktavia, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. 2021. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Pribadi Yang Berkarakter Pada Anak Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5(6):5328–35. doi: 10.31004/basicedu.v5i6.1632.
- Siagian, Fahrizal S., Andi Hakim Lubis, Nabila Afifah Salwa, and Saied Firouzfah. 2024. "Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan : Perbandingan Antara Indonesia Dan Denmark." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10(1):29–52.
- Suhandi, Awalia Marwah, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. 2022. "Penerapan Perilaku Jujur Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar." *Academy of Education Journal* 13(1):40–50. doi: 10.47200/aoej.v13i1.941.
- Sunaryati, Titin, Mahulae, Tiara Rosalia, Sopotunida, Dea Darmawan, and Jingga Agustin Eka. 2023. "Penanaman Sikap Mandiri Dan Tanggung Jawab Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(25):846–53.
- Zulfikar, Muhamad Fikri, and Dinie Anggraeni Dewi. 2021. "Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa." *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*

6(1):104–15.
10.31932/jpk.v6i1.1171.

doi: